

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemanfaatan kawasan hutan yang diukur melalui indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar indikator mencerminkan kondisi positif dengan persentase rata-rata sebesar 73,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Tingkat pemberdayaan masyarakat yang diukur melalui indikator partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya/informasi, kemandirian dan penguatan ekonomi, serta kontrol dan kekuatan tawar masyarakat menunjukkan kondisi cukup baik, dengan persentase sebesar 68,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah memiliki tingkat pemberdayaan yang cukup baik dalam pemanfaatan kawasan hutan.
3. Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa kebijakan pemanfaatan kawasan hutan berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu terdapat pengaruh positif antara kebijakan pemanfaatan kawasan hutan terhadap pemberdayaan masyarakat.

4. Besarnya pengaruh kebijakan pemanfaatan kawasan hutan terhadap pemberdayaan masyarakat ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,946, yang berarti bahwa variabel kebijakan mampu menjelaskan pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat sebesar 94,6%, sedangkan sisanya sebesar 5,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kebijakan pemanfaatan kawasan hutan terhadap pemberdayaan masyarakat, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait

Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat memperhatikan indikator pemerataan dan responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan kebijakan dapat mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Pengelola Kawasan Hutan

Pengelola kawasan hutan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, terutama dalam penyampaian informasi, pelaksanaan kegiatan, serta keterlibatan masyarakat dalam program yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan.

3. Bagi Masyarakat Pemanfaat Kawasan Hutan

Masyarakat diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan, sehingga manfaat dari kebijakan yang telah diterapkan dapat dirasakan secara lebih luas dan mendukung proses pemberdayaan masyarakat.

4. Bagi Pengembangan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemanfaatan kawasan hutan terbukti memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengembangan kebijakan selanjutnya perlu mempertimbangkan aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, seperti partisipasi, akses terhadap sumber daya/informasi, penguatan kapasitas, serta kemandirian masyarakat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, seperti faktor kelembagaan, sosial ekonomi, maupun faktor pendukung lainnya yang belum dikaji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy (14th Ed.)*. Boston: Pearson.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lasswell, H. D. (1951). *The Policy Sciences: Recent Developments In Scope And Method* (D. Lerner & H. D. Lasswell, Eds.). Stanford University Press.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Edisi Kedua). Alfabeta Bandung.

Peraturan-Peraturan :

- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/45373/Uu-No-41-Tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/4727>.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/163479/Permen-Lhk-No-83-Tahun-2016>

Jurnal Ilmiah :

- Afidah, I., Chairiawaty, & Zulfa, S. H. (2025). Integrating Local Wisdom for Sustainable Forest Community Empowerment: Lessons From Indonesia and Malaysia. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 2025(48s), 2468–4376. <https://www.jisem-journal.com/>
- Ali, S., Wang, D., Hussain, T., Lu, X., & Nurunnabi, M. (2021). Forest resource management: An empirical study in northern pakistan. *Sustainability (Switzerland)*, 13(16). <https://doi.org/10.3390/su13168752>

- Andayani, W. (2022). Evaluasi Ekonomi Hutan Serbaguna Berbasis Optimalisasi Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 16(1), 1–8. <https://doi.org/DOI:10.22146/jik.v16i1..3422>
- Astuti, E. W., Hidayat, A., & Nurrochmat, D. R. (2020). Community forest scheme: Measuring impact in livelihood case study lombok tengah regency, west nusa Tenggara province. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(1), 52–58. <https://doi.org/10.7226/jtfm.26.1.52>
- Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, (2), 221–253. <http://www.fao.org/forestry/tenure/en/>,
- Epa, A., Apriyani, A., Maryam, J., Azahra, S. N. I., Muthmainah, Z. A., & Herdiana, D. (2025). Analisis Kebijakan Publik. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 42–49. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.321>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 106(2), 2776–7434. <https://doi.org/10.21274>
- Herdiana, D. (2025). Definisi Kebijakan Publik Menurut Ahli: Perbandingan Dan Penerapannya Dalam Penelitian Kebijakan Publik. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 54–60. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.741>
- Istiqomah, A., & Dwisela, H. S. (2022). Alternatif Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan KPH Cepu. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 27(2), 311–320. <https://doi.org/10.18343/jipi.27.2.311>
- Iswari, N., Ekayani, M., & Ridho Nurrochmat, D. (2025). Analisis Wacana Implementasi Program Perhutanan Sosial Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, 12(2).
- Lawasi, M. A. (2022). Mengkonstruksi Akses, Pendampingan, Dan Inovasi Sebagai Formula Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial Constructing Access, Assistance, And Innovation As A Community Empowerment Policy Formula In The Social Forestry Program. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 30(3), 222–237.
- Lillah, Z., Lubis, D. P., & Sadono, D. (2024). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Kemitraan Konservasi Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.33007/ska.v14i1.3328>

- Lukito, A. F., Padmaningrum, D., & Suminah. (2023). Partisipasi Petani dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. *Intelektiva*, 4(5), 32–46.
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis Legalitas Perhutanan Sosial Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1.
- Malik, M. M. H. A., Irwan, & Zainuddin, A. H. (2026). Analisis Kebijakan Publik Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern. *Indonesia Journal of Intellectual Publication*, 6(2), 155–162.
- Mutaqin, F., Nurrochmat, D. R., & Supriyanto, B. (2023). Evaluating the sustainability of forest utilization in the protected areas of Mandalagiri Forest, West Java, Indonesia. *Biodiversitas*, 24(5), 2745–2755. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d240528>
- Muzakir, & Rahman, A. (2024). Legalitas Pemanfaatan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertanian Oleh Masyarakat Di Kabupaten Dompu. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum*, 4(2), 408–418. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Padila, C. (2025). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Desa terhadap Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 01(1), 8–14. <https://jurnal.samudrailmu.com/index.php/jis>
- Permana, A., Maulidia, A., Husaeni, Mujadidah, H., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 453–457. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.292>
- Putri, T. M., Jumiaty, & Saputra, B. (2025). Proses dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Organisasi Pemerintahan Daerah Kota Pariaman. *Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 03(6), 970–973. <https://doi.org/10.62379/jishs.v3i6.2798>
- Rijal, S., Chairil, Aspan, Z., Mius, H., & Suhardi. (2023). Sejauh mana Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial? (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan di Gunung Silanu KPH Kelara). *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 15(2), 95–106. <https://doi.org/10.24259/jhm.v12i2.27389>
- Sa'diyah, M., & Soetarto, E. (2021). Respons Masyarakat Desa Hutan Pasca Penetapan Perhutanan Sosial (Kasus: Kawasan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) di Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*, 05(02), 220–232. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i2.705>

- Saphera, A. Z., Budjoartie, A., & Zulkarnain, I. (2025). Peraturan Perhutanan Sosial Ditinjau dari Sistem Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(2), 289–311. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.45518>
- Satmaidi, E. (2025). A Legal Framework for Social Forestry Management that Provides Access Rights to Communities in Forest Resource Utilization. *Academia Journal of Law and Governance*, 5(1), 2025. <https://doi.org/10.29240/negrei.v5i1.11994>
- Satria, D., Syarifuddin, H., & Marwoto. (2023). Analisis Pengelolaan Perhutanan Sosial di Sarolangun Provinsi Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 6(1), 12–19. <https://doi.org/10.22437/jpb.v6i1.27968>
- Tarigan, A. H., Muliana, & Huda, K. (2025). Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial dalam Ilmu Politik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, (4), 1662–1668. <https://doi.org/10.63822/48ytw906>
- Yatim, H., Pakanyamong, A. Abd. K., Yatim, H., & Zaman, N. (2025). Managing Community Forest Resources: Dynamics of Property Rights and Institutional Effectiveness in Nambo District. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 19(1), 36–48. <https://doi.org/10.22146/jik.v19i1.13272>
- Zamrodah, Y., Prayudhi, L. A., & Anwarudin, D. A. F. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Sekitar Hutan Produksi Tetap terhadap Program Perhutanan Sosial (Studi Kasus LMDH Jati Jaya Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar). *Journal Viabel Pertanian*, 18(2), 88–98. <http://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/viabel>

Sumber Lain :

- BPS Kabupaten Bojonegoro. (2025). *Kecamatan Kedewan Dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Bojonegoro.
- Kawengan. (2025, February 6). Aksi Penanaman Bersama Di KPS RPH Kawengan: Sinergi Untuk Kelestarian Lingkungan. *Website Desa Kawengan*.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2025, October 8). KLHK Lepas Lahan Hutan 31,61 Hektar Di Wilayah Bojonegoro Untuk Permukiman Dan Fasilitas Umum. *Redaksi*.
- Perum Perhutani. (2024). *Perhutani Divisi Regional Jawa Timur – Struktur Organisasi: KPH Bojonegoro*.